

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang dibuat oleh pemerintah Indonesia periode 2014-2019 memiliki konsep membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa. Dalam membangun perdesaan, pemerintah telah mengesahkan UU tentang Desa, yaitu UU No. 6 Tahun 2014 dan didukung dengan PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pada Bab IV UU No. 6 Tahun 2014, diatur bahwa kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa (Anon., 2014). Kewenangan desa tersebut membuat desa memiliki data-data dan informasi yang disimpan di dalam berkas-berkas. Untuk memudahkan pengelolaan berkas-berkas yang ada, pemerintah desa dapat mengembangkan sebuah sistem informasi desa yang dapat membantu pihak pemerintah desa.

Saat ini, teknologi informasi telah berkembang dengan pesat membuat pemerintah mengembangkan sistem informasi desa menggantikan sistem yang masih manual. Sistem informasi desa telah banyak dikembangkan oleh pemerintah yang bekerja sama dengan institusi pendidikan maupun LSM. Salah satunya adalah sistem informasi Profil Desa dan Kelurahan yang telah dikembangkan oleh

pemerintah dan menjadi sistem informasi yang digunakan untuk mengelola basis data kependudukan yang ada di masing-masing desa. Hal ini tertuang dalam Permendagri No. 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan. Dalam perkembangannya sistem informasi Profil Desa dan Kelurahan ini belum optimal penggunaannya, karena hanya digunakan untuk internal pemerintah, padahal data profil desa tersebut dapat digunakan untuk pelayanan publik. Oleh karena itu, pemanfaatan sistem informasi profil desa belum efektif dalam membantu pelayanan masyarakat dan pembangunan desa. Hal inilah yang membuat Universitas Atma Jaya Yogyakarta bersama dengan pemerintah di beberapa kabupaten yang ada di Indonesia untuk membangun sistem informasi yang dapat memenuhi beberapa kegiatan yang ada dalam kewenangan desa, yaitu Sistem Informasi Desa dan Kawasan (SIDEKa).

Sistem yang diberi nama Sistem Informasi Desa dan Kawasan (SIDEKa) tersebut dibuat sesuai dengan visi, misi, dan tujuan pembangunan desa dan kewenangan desa. Sistem Informasi Desa dan Kawasan (SIDEKa) telah diimplementasikan di 8 kabupaten di Indonesia, yaitu Belitung Timur, Boalemo Gorontalo, Pangkajene Kepulauan, Raja Ampat, Gianyar, Pemalang, Tasikmalaya, dan Kulon Progo. Sistem Informasi Desa dan Kawasan (SIDEKa) saat ini sudah memiliki data dan informasi desa yang sangat banyak. Hal ini dapat dimanfaatkan pihak supra desa dalam pengambilan keputusan saat menyusun perencanaan pembangunan daerah, karena salah satu aspek yang dilihat saat perencanaan pembangunan daerah adalah data kependudukan.

Pemerintah tingkat kabupaten atau kota dan kecamatan atau lebih dikenal dengan supra desa memiliki kewajiban dalam menyediakan data mengenai keadaan ekonomi, kependudukan, dan potensi yang ada di masing-masing desa yang berada di wilayahnya. Data-data tersebut akan dijadikan acuan sebagai pengambilan keputusan dalam proses perencanaan pembangunan. Oleh karena itu, pemerintah pada tingkat supra desa dapat mengelola data-data yang dimiliki masing-masing desa untuk menjadi acuan dalam merumuskan permasalahan-permasalahan dan memanfaatkan potensi-potensi yang ada, sehingga dapat diambil kebijakan yang tepat.

Sistem Informasi Desa dan Kawasan (SIDEKa) selanjutnya akan dikembangkan pada level supra desa, khususnya untuk pemerintah kabupaten. Untuk melakukan analisis pada data dan informasi desa yang ada, data dan informasi tersebut harus valid dan akurat, sehingga dapat dijadikan dasar dalam perencanaan pembangunan pada skala menengah dan panjang. Hal inilah yang menjadi fokus pada penelitian ini. Sistem informasi pada level supra desa diharapkan menjadi suatu aplikasi *business intelligence* yang dapat digunakan oleh pemerintah di level supra desa dan semua pemangku kepentingan dalam membuat keputusan-keputusan yang strategis maupun taktis. Oleh karena itu, penulis memilih topik pembangunan *business intelligence* supra desa dan kawasan perdesaan untuk perencanaan pembangunan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang ada, maka rumusan masalahnya adalah:

1. Bagaimana membangun *business intelligence* supra desa pada level kabupaten yang dapat digunakan untuk membantu pengambilan keputusan dalam perencanaan pembangunan?

1.3 Batasan Masalah

Penyusunan tugas akhir ini dibatasi oleh beberapa hal, yaitu:

1. *Business intelligence* supra desa akan dibangun menjadi aplikasi *business intelligence* di tingkat kabupaten.
2. *Business intelligence* ini menggunakan ROLAP (*Relational On Line Analytic Processing*) untuk melakukan analisis.
3. *Business intelligence* akan dibangun berbasis web berbentuk OLAP yang ditampilkan dalam bentuk pivot table, grafik, dan peta.
4. Data yang digunakan dalam pembangunan *business intelligence* ini merupakan data rekaan dimana struktur basis datanya diambil dari basis data SIDEKa.
5. Hasil pembangunan *business intelligence* hanya terbatas pada subjek kependudukan dan potensi desa.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai adalah:

1. Membangun *business intelligence* supra desa pada level kabupaten yang dapat digunakan untuk membantu pengambilan keputusan dalam perencanaan pembangunan.

1.5 Metodologi Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Studi Pustaka

Studi pustaka dilakukan dengan mengumpulkan informasi dari buku-buku, peraturan-peraturan pemerintah dan jurnal ilmiah yang membahas mengenai pembangunan *business intelligence* dan pembuatan sistem informasi untuk desa.

2. Analisis Kebutuhan Perangkat Lunak

Analisis dilakukan untuk mendapatkan spesifikasi kebutuhan dari *business intelligence*. Analisis dilakukan dengan analisis dokumen dan data dari SIDeKa. Hasil analisis didokumentasikan dalam dokumen Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak (SKPL) dan dalam *Information Package*.

3. Perancangan Perangkat Lunak

Perancangan dilakukan untuk menghasilkan rancangan yang siap diubah dalam kode program. Perancangan dilakukan dalam empat hal, yaitu perancangan arsitektur, perancangan rinci,

perancangan data, dan perancangan kelas. Hasil perancangan didokumentasikan dalam dokumen Deskripsi Perancangan Perangkat Lunak (DPPL).

4. Pengkodean Perangkat Lunak

Pengkodean dilakukan untuk mengubah hasil rancangan ke dalam proses ETL (*Extract, Transform, dan Loading*) dan kode program.

5. Pengujian Perangkat Lunak

Pengujian dilakukan untuk menguji *business intelligence* yang telah dikodekan apakah telah sesuai dengan spesifikasi yang diharapkan. Hasil pengujian didokumentasikan dalam dokumen Perancangan Deskripsi dan Hasil Uji Perangkat Lunak (PDHUPL).

6. Pembuatan User Manual

Pembuatan User Manual untuk menyediakan panduan yang akan digunakan oleh pemangku kepentingan dalam penggunaan *business intelligence* supra desa.

